GAYA KEPEMIMPINAN KETUA FRAKSI PDI-PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

(Skripsi)

Oleh:
BAGASKORO ADHI WIBOWO

1216021121

ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017

ABSTRAK

GAYA KEPEMIMPINAN KETUA FRAKSI PDI-PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Bagaskoro Adhi Wibowo

Kebijakan kenaikan harga BBM yang mendadak dapat membuat rakyat tidak siap dan akan semakin terpuruk. Oleh karena itu peran seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, dalam hal ini peran ketua Fraksi PDI Perjuangan sangat penting dalam membentuk serta mengevaluasi kebijakan yang sedang atau akan diimplementasikan. Ketua fraksi harus memposisikan perannya bukan hanya sebagai perwakilan partai saja namun juga sebagai wakil rakyat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya kepemimpinan ketua fraksi PDI Perjuangan, Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi dan perannya. Jumlah sampel penelitian ini adalah 7 (tujuh orang) yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Data tentang gaya kepemimpinan ketua fraksi PDI Perjuangan diambil menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan cara *triangulasi*.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Keputusan dan Kebijakan ketua fraksi PDI Perjuangan Provinsi Lampung diputuskan secara bersama-sama dengan *stakeholder* yang ada. (2) Ketua fraksi PDI Perjuangan Provinsi Lampung selalu melakukan komunikasi yang baik dengan semua *stakeholder* yang ada dan berjalan dua arah. (3) Ketua fraksi PDI Perjuangan Provinsi Lampung melakukan pengawasan dengan sewajarnya tidak berlebihan dilihat dari respon dari semua s*takeholders* yang ada. (4) Ketua fraksi PDI Perjuangan Provinsi Lampung selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap *stakeholder* yang ada. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ketua fraksi PDI Perjuangan provinsi Lampung menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis dalam menjalankan fungsi dan perannya.

Kata kunci: gaya kepemimpinan, ketua fraksi, PDI Perjuangan, provinsi Lampung

ABSTRACT

LEADERSHIP STYLE OF CHAIRMAN OF THE PDI-PERJUANGAN FRACTION THE PEOPLE'S RERRESENTATIVE COUNCIL IN LAMPUNG PROVINCE

by

Bagaskoro Adhi Wibowo

The policy about fuel price hikes in sudden will make people unprepared and worse off. Therefore, the role of a leader is very influential in solving the problems that are exists. In this case the role of chairman of the PDI-P fraction is very important in shaping and evaluating the policies that are or will be implemented. The fraction chairman must position his role not only as a party representative but also as a representative of the people.

The purpose of this research is to know the leadership style of PDI Perjuangan faction chairman, Lampung Province in performing its function and role. The number of samples of this research is 7 (seven people) selected by purposive sampling technique. Data on leadership style of PDI Perjuangan fraction chairman was taken using observation, interview, and documentation technique, then being analyzed by triangulation.

The results by this research are: (1) Decision and Policy of the chairman of the fraction of PDI Perjuangan Lampung Province be decided jointly with the existing stakeholders. (2) Chairman of the fraction of PDI Perjuangan Lampung Province always make a good communication with all stakeholders that exist and walk both ways. (3) Chairman of the fraction of PDI Perjuangan in Lampung Province to supervise with reasonable not seen by the responses from all stakeholders. (4) Chairman of the fraction of PDI Perjuangan in Lampung Province always provide the widest opportunity to every stakeholder. Based on the results of the research mentioned above, it can be concluded that the chairman of the fraction of PDI Perjuangan in Lampung province using a democratic leadership style in performing its functions and roles.

Keyword: leadership style, fraction leader, PDI Perjuangan, Lampung province

GAYA KEPEMIMPINAN KETUA FRAKSI PDI-PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Oleh:

Bagaskoro Adhi Wibowo

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017

Judul Skripsi	:	**GAYA KEPEMIMPINAN KETUA FRAKSI PDI-PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**
Nama Mahasiswa	:	Bagaskoro Adhi Wibowo
No. Pokok Mahasiswa	:	**1216021121**
Jurusan	:	**Ilmu Pemerintahan**
Fakultas	:	**Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Budi Harjo, S.Sos., M.IP.
NIP 19680112 199802 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.** .....

Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **21 Juni 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Juli 2016
Yang Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
171A9ADF628561957
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Bagaskoro Adhi Wibowo
NPM. 1216021121

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Bagaskoro Adhi Wibowo lahir di Tanjung Karang 17 Mei 1994. penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo dan ibu Popon Komariah.

Penulis mengawali pendidikan di Sekoah Dasar Negeri 2 Rajabasa Bandar Lampung pada tahun 2000-2006, Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama 22 Bandar Lampung pada tahun 2006-2009, Selanjutnya pada tahun 2009-2012 penulis melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Bandar Lampung.

Pada tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) Pindah Menjadi Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

MOTTO

Kehidupan Mengejarkan Kita Berharap, Berusaha, Kecewa Lalu Bahagia

(Bagaskoro Adhi Wibowo)

Jagan Pernah Takut Gagal dan Kecewa Karna Kekecewaan Hanyalah Langkah Awal Meraih Kesuksesan

(Bagaskoro Adhi Wibowo)

Jangan Pernah Menyesal Dalam Hidup, Penyesalan Hanya Untuk Orang-orang Yang Tidak Pernah Berusaha

(Bagaskoro Adhi Wibowo)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan karya kecilku ini untuk :

Kedua Orang Tua Tercinta
Bapak dan Mama yang sangat aku cintai dan sayangi, terima kasih untuk segala yang telah kalian lakukan untukku, cinta, kasih sayang, do'a yang tiada henti, dan pengorbanan, serta motivasi yang selalu diberikan dengan sabarnya demi terwujudnya keberhasilanku.

Adik-adikku
Yang senantiasa selalu memberikan semangat dan dukungan serta motivasi untuk keberhasilan dan kesuksesanku dan kita semua.

Keluarga Besar yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepadaku.

Sahabat dan teman-temanku yang tulus, terimakasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.

Para pendidik dan Almamater Universitas Lampung. Yang selalu memberikan bekal ilmu dan pesan moral untuk melangkah
jauh lebih baik di masa depan.

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul "Orientasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 " sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3. Bapak Drs. Budi Harjo, M.I.P. selaku Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staff Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.

5. Orang yang selalu memberikan perhatian, semangat dan dukungan Eka Ratna Sari.
6. Bapak Arwin Ahmat dan Uche Mardiah ningsih terimakasih karena sudah memberikan dukungan yang tiada henti baik berupa Moril dan Materi Terima Kasih Banyak.
7. Terima kasih kepada teman SMA atas kebahagiaan dan canda tawa selama ini semoga kelak kita dapat berkumpul dan Menceritakan pencapaian dan kesuksesan bersama Amin.
8. Teman-teman Albert Zeksen Harianja, Charles P Rajagukguk, Riza Fahlevi, Rizki Aristoni, Rifky Febrihanuddin, M ibnu Fadhil, Yoviana S, Afriska Amediya, Ginda Putra Pramadya, semoga kita dapat meraih kesuksesan.
9. Angkatan 2013 Vivi Alvionita, Maria Christina, Aziza Aulia Fahmi, Restiani Damayanti, Fina Ria Tisa, Ahmad Irfan, Ika Khodijah, Defa Septia, Chici Afriantina Sinaga, Raindy Zikri , Ardy, dll yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas Bantuannya Selama ini.

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 11 Juli 2017

Bagaskoro Adhi Wibowo

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

Halaman

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Kepemimpinan 13
B. Gaya Kepemimpinan 22
C. DPRD dan Fraksi DPRD 32
D. Kerangka Pikir 36

III. METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian 37
B. Fokus Penelitian 38
C. Lokasi Penelitian 39
D. Jenis dan Sumber Data 40
E. Teknik Pengumpulan Data 41
F. Teknik Pengolah Data 44
G. Teknik Analisis Data 45
H. Teknik Keabsahan Data 46

IV. GAMBARAN UMUM
A. Provinsi Lampung 48
B.. Sejarah Singkat PDI Perjuangan 50
C. Profil DPRD Provinsi Lampung 53
D. Definisi Lembaga DPRD 56
E. Definisi Fraksi Dan Fungsinya 57

V. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Keputusan Dan Kebijakan 60
B. Komunikasi..... 68
C. Pengawasan 74
D. Kesempatan Menyampaikan Saran, Pertimbangan Dan Pendapat .. 79

VI. SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN..... 86
B. SARAN 88

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

Tabel 1. Daftar Anggota Fraksi DPRD Provinsi Lampung Tahun 2014 3
Tabel 2. Daftar Anggota Fraksi DPRD PDI Perjuangan 6
Tabel 3. Data Primer 40
Tabel 4. Daftar Anggota Fraksi DPRD Provinsi Lampung Tahun 2014 54
Tabel 5. Daftar Perda Provinsi Lampung Tahun 2016 63
Tabel 6. Daftar Perda Hasil Aspirasi Masyarakat 64
Tabel 7. Indikator Keputusan dan Kebijakan..... 67
Tabel 8. Indikator Komunikasi 74
Tabel 9. Indikator Pengawasan 78
Tabel 10. Indikator Kesempatan 84
Tabel 11. Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

Gambar 1. Kerangka fikir 36

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu lembaga kekuasaan yang ada di Indonesia adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daaerah (DPRD). DPRD adalah badan *deliberatif* yaitu sebuah organisasi yang secara bersama membuat keputusan setelah adanya perdebatan dan diskusi yang konstruktif (dengan pemerintah) dengan kuasa membuat hukum (*legislating)*, pengawasan *(kontroling)* dan penganggaran *(budgeting)*. sistem parlementer menjadikan, kedudukan legislatif sangat besar sehingga kekuasaan eksekutif hanya mungkin didapat setelah kontestan pemilu berhasil memperoleh suara mayoritas di parlemen. Sedangkan dalam sistem presidensil, legislatif merupakan cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran yang lainnya.

Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia adalah warga negara yang menjadi bagian dari partai politik dan terpilih melalui pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara sederhana DPRD merupakan jabatan bagi masyarakat di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan kepentinganya, yang selanjutnya akan diartikulasi dalam sebuah kebijakan politik sebagai mandat dan dasar bekerja bagi para eksekutif. Ide tersebut dalam implementasinya tidaklah sesederhana yang kita bayangkan. Banyak faktor yang menyebabkan ide tersebut menjadi rumit, sehingga rakyat dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingannya seringkali tidak lagi melalui jalur kelembagaan demokrasi resmi dalam hal ini DPRD, tetapi langsung turun kejalan berdemonstrasi, bahkan ungkapan berlebihan ada kalanya diwujudkan dalam bentuk hal-hal negative yang lebih anarkhis.

Sejatinya setiap anggota legislatif membawa kedaulatan konstituennya dimana kedaulatan rakyat tersebut tidak bisa dikesampingkan oleh siapapun. Prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat daerah selama ini diwujudkan melalui DPRD yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat di daerah, Melalui fraksi yang merupakan kapanjagan tangan dari partai politik dapat saja melemahkan atau bahkan mengeyampingkan kedaulatan rakyat tersebut. Anggota partai politik sekalipun ketua fraksi harus menjalakan fungsinya tidak hanya menjadi anggota partai yang melaksanakan kebijakan partai tetapi juga sebagai wakil rakyat.

Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPRD. Fraksi mempunyai sekretariat, Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi, Anggota fraksi memiliki fungsi Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota masing-masing fraksinya, Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi, Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para Anggota dan Memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu

Provinsi Lampung memiliki jumlah fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD. Adapun nama fraksi dan anggotanya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Daftar Anggota Fraksi DPRD Provinsi Tahun 2014

NO	PARTAI	NAMA	JABATAN
1	PDIP	Drs. Hi. Tulus Purnomo Wibowo	Ketua
2		I Komang Koheri, SE	Wakil ketua
3		Danang Sumpena, S.Sos, MM	Wakil ketua
4		Edi Rusdianto, SH, MM	Sekretaris
5		Yanuar Irawan, SE	Wakil Sekrestaris
6		Hj. Syafariah Widianti, SH, MH	Bendahara
7		Hj. Eva Dwiana, SE, M.Si	Wakil Bendahara
8		Mingrum Gumay, SH, MH	Anggota
9		Hi. Watoni Noerdin, SH, MH	Anggota
10		Aprilliati, SH, MH	Anggota
11		Hi. Dedi Afrizal, S.kep	Anggota
12		Bambang Suryadi, SH	Anggota
13		Drs. Yose Rizal	Anggota
14		Hi. M. Rizal, SE	Anggota
15		Toto Sumirat. S, SH	Anggota
16		Ketut Erawan, SH	Anggota
17		Ir. Kadek Suwartika	Anggota

1	DEMOKRAT	Hi. Imer Darius, SE	Ketua
2		Ir. Nerozely Agung Putra	Wakil ketua
3		Muhammad Junaidi, SH	Sekretaris
4		Ir. Hi. Yandri Nazir, MM	Anggota
5		Hi. Toto Herwantoko, MM	Anggota
6		Hertanto Lojaya	Anggota
7		Amaluddin, SH	Anggota
8		Drs. Mozes Herman	Anggota
9		Agus Revolusi. S.sos	Anggota
10		Ir. Raden Muhammad Ismail	Anggota
11		Sugiarto AW	Anggota
1	GERINDRA	Elly Wahyuni, SE, MM	Ketua
2		Edi Hamim, SE, MBA	Sekertaris
3		Hi. Pattimura, SE	Anggota
4		Drs. Hi. Mikdar Ilyas, MM	Anggota
5		Harry Ananda	Anggota
6		Ikwan Fadil Ibrahim, SH	Anggota
7		Hi. Andika Wibawa, SR	Anggota
8		Hi. Putra Jaya Umar	Anggota
9		I Made Suarjaya, SH	Anggota
10		Azwar Safaruddin	Anggota
1	PAN	M. Hazizi, SE	Ketua
2		Hi. Abdullah Fadri Auli, SH	Wakil ketua
3		Hi. Suprapto, S.Psi, MH	Sekretaris
4		Hamidi, SE	Wakil Sekrestaris
5		Joko Santoso, SP	Bendahara
6		Hj. Asmara Dewi	Anggota
7		Abdullah Surajaya	Anggota
8		Hi. Muswir, A,Md	Anggota
1	PKS	Hi. Ade Utama Ibnu, SE	Ketua
2		Hi. Ahmad Mufti Salim, Lc, MA	Wakil ketua
3		Ir. Hi. Akhmadi Sumaryanto	Sekretaris
4		Hi. Antoni Iman, SE	Anggota
5		Ir. Hi. Johan Sulaiman, MM	Anggota
6		Ir. Hi. HAntoni Hasan, M.Si	Anggota
7		Hi. Mardani Umar, SH, MH	Anggota
8		Ir. Hi. Murdiansyah Mulkan	Anggota
1	GOLKAR	Ismet Roni, SH	Ketua
2		Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos	Wakil ketua
3		Hi. M. Thaib Husin	Sekretaris
4		Drs. Hi. Azwar Yacub	Anggota

5		Hi. Miswan Rody, S.IP	Anggota
6		Drs. I Nyoman Suryana	Anggota
7		Drs, FX. Siman	Anggota
8		Drs. Tony Eka Chandra	Anggota
1	NASDEM	Hi. A. Zamzani Yasin	Ketua
2		Fauzan Sibron, SE, Akt	Wakil ketua
3		Hi. Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom	Sekretaris
4		Dr. Hj. Asih Fatwanita	Anggota
5		Budi Yuhanda, SH, M.Kn	Anggota
6		Hj. Sahyana, SE	Anggota
7		Amrullah Ahmad El Hakim	Anggota
8		Hj. Sahanah	Anggota
1	PKB	Hidir Ibrahim, M.Si	Ketua
2		Khaidir Bujung, S.Ag	Wakil ketua
3		Drs. M. Effendi	Sekretaris
4		Drs. Lazuardi Alwi	Anggota
5		Hi. Noverisman Subing, Sh, MM	Anggota
6		Karlina, SE	Anggota
7		Ir. Hi. Midi Iswanto, MH	Anggota
1	PERSATUAN RAKYAT	Hi. M.C. Iman Santoso, SH	Ketua
2		Hi. Hali Fahmi Almarosyi, SE, Akt	Wakil ketua
3		Hi. Yozi Rizal, SH	Sekretaris
4		Hj. Zeldayantie	Anggota
5		Drs. Hi. Abdul Haris	Anggota
6		Angga Jevi Surya	Anggota

Sumber : Diolah Peneliti

Berdasarkan Hasil pemilu legislative tahun 2014 di Provinsi Lampung, Partai demokrasi Indonesia perjuangan mendapat kursi terbanyak dalam pemilu yang sudah diselenggarakan di Provinsi Lampung, anggota fraksi PDI Perjuangan yang ada di dewan perwakilan rakyat daerah provinsi lampung sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Anggota Fraksi DPRD PDI Perjuangan.

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Hi. Tulus Purnomo Wibowo	Ketua
2	I Komang Koheri, SE	Wakil ketua
3	Danang Sumpena, S.Sos, MM	Wakil ketua
4	Edi Rusdianto, SH, MM	Sekretaris
5	Yanuar Irawan, SE	Wakil Sekrestaris
6	Hj. Syafariah Widianti, SH, MH	Bendahara
7	Hj. Eva Dwiana, SE, M.Si	Wakil Bendahara
8	Mingrum Gumay, SH, MH	Anggota
9	Hi. Watoni Noerdin, SH, MH	Anggota
10	Aprilliati, SH, MH	Anggota
11	Hi. Dedi Afrizal, S.kep	Anggota
12	Bambang Suryadi, SH	Anggota
13	Drs. Yose Rizal	Anggota
14	Hi. M. Rizal, SE	Anggota
15	Toto Sumirat. S, SH	Anggota
16	Ketut Erawan, SH	Anggota
17	Ir. Kadek Suwartika	Anggota

Sumber : Diolah peneliti

Fraksi sebagai kepanjangan tangan partai politik dapat mewarnai berbagai proses politik yang terjadi di tingkat alat kelengkapan DPRD dan *lobby* di luar kelembagaan formal DPRD. Fraksi memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD baik secara kelembagaan maupun terhadap masing-masing individu anggotanya. Fraksi tidak hanya sekedar sebagai wadah berhimpun para anggota partai politik yang duduk sebagai wakil rakyat di parlemen. Tetapi lebih dari itu, fraksi juga dapat mengarahkan setiap pilihan sikap dan keputusan yang diambil dalam proses politik pemerintahan secara keseluruhan.

Mengingat besarnya peranan fraksi, maka bagi setiap anggota parlemen akan sukar menentukan sikapnya untuk dapat terlepas dari ketentuan atau aba-aba

politik yang disampaikan oleh fraksinya. Perbedaan sikap memang dapat berkembang dalam konteks yang konstruktif, ketika pilihan yang diambil individu tetap berada dalam batas toleransi atau garis ketentuan fraksi. Batas toleransi yang ditetapkan menjadi wilayah yang tidak boleh dilanggar, karena merupakan hal prinsipil dalam menjaga ruang kebebasan para anggotanya. Konsekuensi dapat dihadapi ketika terjadi pelanggaran atas batas - batas prinsipil tersebut dan yang terberat adalah berupa pemberian sanksi pergantian antar waktu (PAW) atas usul partai atau populer dengan istilah *recall.*

Posisi fraksi yang strategis tidak saja terkait dengan proses pembahasan agenda DPRD tentang rencana kebijakan daerah, seperti halnya antara lain mengenai Peraturan Daerah (Perda). Tetapi lebih dari itu, posisi fraksi juga berperan terhadap proses penggunaan sarana pelaksanaan hak-hak DPRD baik secara kelembagaan maupun setiap individu anggotanya, dalam setiap menghadapi persoalan atau isu publik lokal. Dengan sistem pembahasan agenda DPRD yang bertumpu pada sikap fraksi, maka sukar diabaikan adanya pertimbangan atas desain komposisi dan kekuatan anggota masing-masing fraksi, baik secara aspek kuantitas maupun aspek kualitas para kader partai yang mengisinya.

Untuk lembaga legislataif seorang ketua fraksi harus mampu berpikir secara sistematis dan teratur,mempunyai pengalaman dan pengetahuan serta mampu menyusun rencana dan dapat menjalankanan fungsinya sebagai ketua fraksi. Adapun fungsi ketua fraksi sebagai berikut:

1. menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya.
2. memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR.
3. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing.
4. mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang-undang mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR.
5. menentukan penanganan suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR.
6. mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR; dan melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

   Sumber (https://www.indonesianparliament.com/pimpinan-dpr/ketua-fraksi-fungsi di akses tanggal 28 jam 10.00)

Kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang baru saja diberlakukan dinilai terlalu mendadak. Hal ini dikhawatirkan bisa memicu penurunan produktivitas. Ketua Umum PDI Perjuangan

Megawati Soekarnoputri meminta semua kader PDI Perjuangan untuk mendukung program pemerintahan Jokowi-JK. Termasuk rencana untuk menaikan harga BBM. apapun kebiijakan yang diambil oleh pemerintah Jokowi-JK, PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung harus mendukung penuh. Jika ada kader yang berseberangan, sanksi akan bisa saja diberikan oleh partai.

PDI Perjuangan saat ini mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. PDI Perjuangan dikenal sebagai partai yang tegas menolak kenaikan BBM. Ada alasan yang berbeda. Saat ini ada defisit subsidi anggaran, tapi di saat yang sama Pak Jokowi ingin memperbaiaki skema perbaikan subsidi. Sehingga dalam skema yang akan datang, subsidi akan langsung diterima oleh grup misalnya nelayan dan orang miskin lainnya.

Kenaikan harga BBM yang mendadak bisa membuat rakyat tidak siap. Apalagi, rakyat tengah dihadapkan pada persoalan biaya listrik dan Pemberlakuan PP nomor 60 Tahun 2016. Kebijakan ini akan membuat masyarakat semakin terpuruk. Apalagi kenaikan harga BBM bakal mempengaruhi kenaikan biaya transportasi umum maupun biaya pengadaan barang atau jasa. Kenaikan harga BBM yang terkesan mendadak ini juga bisa membuat para pelaku usaha, terutama usaha kecil dan masyarakat kelas menengah kebawah, akan kelabakan dan merasakan langsung dampaknya.

Berdasarkan hasil prariset dengan melakukan wawancara kepada informan maka diketahui bahwa:

> “Kebijakan Pemerintah Jokowi memang sangat mengejutkan, namun sebagai kader partai saya harus mendukung kebijakan tetapi sebagai wakil rakyat saya menyayangkan kebijakan tersebut. Sebagai mana perintah ibu ketua umum yang mengharuskan semua kader harus mendukung kebijkan ini, memang tidak semua kader menyetujuinya. Perbedaan pendapat antar anggota tidak dapat di hindarkan, tetapi perbedaan itu tidak sampai menjadi konflik. Karna semua kader percaya bahwa apapun yang di lakukan pemerintah sudah memalui pertimbangan yang sangat matang”

Peran ketua Fraksi PDI Perjuangan sangat penting dalam melihat kebijakan yang di ambil oleh partainya. Saat ini ketua fraksi harus memposisikan perannya tidak hanya sebagai kepanjangan tangan yang harus mematuhi kebijakan yang di ambil oleh partinya namun juga mempertimbangkan dampak yang akan di rasakan oleh konsituennya yang menerima dampak langsung dari kebijakan yang di ambil oleh partainya tersebut.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui kesuksesan pemimpin ialah dengan mempelajari gayanya, karena gaya kepemimpinan banyak mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku bawahannya. Pentingnya gaya kepemimpinan diterapkan kepada bawahan sesuai dengan kedewasaan/kematangan bawahan merupakan persyaratan mutlak keefektifan kepemimpinan dalam keberhasilannya.

Berbagai macam gaya atau tipe yang ditunjukkan masing-masing orang dalam menjalankan kepemimpinan ketua fraksi tentulah tidak sama tergantung karakter masing-masing pemimpin, kondisi anggota yang dipimpinnya dan juga ideology partai yang menaungi. Karena Pengaruh gaya kepemimpinan seorang ketua fraksi mempunyai nilai yang sangat *urgent* maka dengan gaya kepemimpinan yang dimiliki seseorang ketua fraksi itulah

akan menentukan berhasil atau tidak seorang ketua fraksi mengemban dan menjalankan fungsi nya sebagai seorang anggota partai namun juga sebagai alat perjuangan rakyat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai beribut : Bagaimana gaya kepemimpinan ketua fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsinya ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Gaya kepemimpinan ketua fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsinya.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan disiplin Ilmu Pemerintahan, khususnya berkaitan dengan

gaya kepemimpinan ketua fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Lampung.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Ketua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengembangkan gaya kepemimpinan yang tepat dalam lembaga legislatif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kepemimpinan

1. Pemimpin

Pemimpin dan kepemimpinan adalah hal yang sangat urgen dan menarik untuk di bahas dalam perjalanan bangas ini, bagaimana kepemimpinan adalah hal yang dibutuhkan dan sangat penting dalam menjalakan semua roda pemerintahan. Menurut Hersey, Blanchard dan Natemeyer dalam Thoha (2010 :260) merasakan bahwa pemimpin-pemimpin itu hendaknya tidak hanya menilai prilaku kepemimpinan meraka agar mengerti bagaimana sebenarnya mereka mempengaruhi orang-orang lain, akan tetapi mereka seharusnya juga mengamati posisi mereka dan cara mengungkapkan kekuasaannya.

Menurut Hasibuan (2016 :43), pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Henry Pratt Faichild dalam Kartono (2004:38-39), menyatakan bahwa pemimpin dalam pengertian luas adalah seseorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan cara mengatur, mengarahkan, mengorganisir, atau mengontrol

usaha/upaya orang lain, atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi. Pemimpin dalam pengertian sempit adalah seseorang yang memimpin dan membimbing dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya, dan *acceptancy* penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya.

2. Kepemimpinan

kepemimpinan *(leadership)* adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikut-pengikutnya lewat prses komunikasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Keseluruhan tindakan guna mempengaruhi serta menggiatkan orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan, atau dengan definisi yang lebih lengkap dapat dikatakan bahwa kepemimpinan menurut Sanusi (2009:19), adalah suatu proses untuk mempengaruhi atau menggerakkan orang lain secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. George R. Terry dalam Thoha (2012:5), merumuskan bahwa kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya dapat diarahkan mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan berarti mempengaruhi orang lain untuk mengambil tindakan, artinya seorang pemimpin harus berusaha mempengaruhi pengikutnya dengan berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model (menjadi teladan), penetapan sasaran, restrukrisasi organisasi, dan mengkomunikasikan sebuah visi. Dengan demikian, seorang pemimpin dapat dipandang

efektif apabila dapat membujuk para pengikutnya untuk meninggalkan kepentingan pribadi mereka demi keberhasilan organisasi.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sedarmayanti (2009:119) bahwa kepemimpinan (*leadership*), adalah:

a. Proses dalam mempengaruhi orang lain agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan seorang pemimpin.
b. Hubungan interaksi antar pengikut dengan pimpinan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
c. Proses mempengaruhi aktivitas/perilaku kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan.
d. Proses memberi pengarahan berarti terhadap usaha kolektif dan menyebabkan adanya kesediaan untuk melakukan aktivitas/perilaku yang diinginkan untuk pencapaian sasaran.
e. Proses mempengaruhi kegiatan individu/kelompok dalam usaha mencapai tujuan situasi tertentu.

Kepemimpinan menurut stogdill dalam buku nya *Handbook of Liadership* dalam Kaloh (2003:10) mengandung pengertian sebagai berikut :

a. Kepemimpinan sebagai titik pusat proses-proses kelompok.
b. Kepemimpinan adalah suatu kepribadian yang mempunyai pengaruh.
c. Kepemimpinan adalah seni untuk menciptakan kesesuaian faham atau keseiaan, kesepakatan.
d. Kepemimpinan adalah pelaksaan pengaruh.

e. Kepemimpinan adalah tindakan atau prilaku.
f. Kepemimpinan adalah suatu bentuk persuasi.
g. Kepemimpinan adalah suatu hubungan kekuatan/kekuasaan.
h. Kepemimpinan adalah sarana mencapai tujuan.
i. Kepemimpinan adalah suatu hasil dari interaksi.
j. Kepemimpinan adalah peranan yang dipilihkan.
k. Kepemimpinan sebagai inisiasi (permulaan) dari struktur.

Kekuasaan seorang pemimpin bersumber dari kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain karena sifat-sifat dan sikapnya, luas pengetahuan dan pengalamannya, pandai berkomunikasi dalam hubungan-hubungan interpersonal. Pemimpin adalah seorang yang memiliki kecakapan khusus sehingga mempunyai kekuasaan, kewibawaan dalam mengarahkan dan membimbing bawahannya untuk mendapat pengakuan serta dukungan dari bawahan untuk mencapai tujuan tertentu. Karakter juga menentukan bagaimana pemimpin itu menerapkan gaya kepemimpinan nya dalam suatu lembaga atau oraganisaisi.

3. Karakter Pemimpin

Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, yang menciptakan karakter yang harus di miliki pemimpin saat ini. Pada awalnya karekter ini ditujukan kepada pendidik agar bisa menginspirasi, memberikan

teladan dan memotivasi siswanya. Namun karakter ini ternyata sangat pas pula untuk seorang pemimpin. Adapun karakter tersebut yaitu :

a. Ing Ngarsa Sung Tuladha

   Berarti dari depan memberikan teladan. Seorang pemimpin merupakan orang yang akan dilihat oleh seluruh orang yang dipimpinnya. Sehingga, sebagai pemimpin harus bisa menjadi teladan, pembimbing, dan memberikan contoh kepada yang dipimpin. Ketika seorang pemimpin itu di depan, ia tidak serta merta hanya memerintah. Seorang pemimpin harusnya memberikan teladan dan tanggungjawab untuk membawa kepada visi bersama yang telah direncanakan.

b. Ing Madya Mangun Karsa

   Berarti di tengah menggugah semangat. Seorang pemimpin dalam ketika berada di tengah-tengah yang dipimpin harus bisa mengayomi, menjalin kebersamaan, dan memotivasi untuk mencapai tujuan. Seorang pemimpin harus bisa merangkul yang dipimpinnya, mau menerima kritik dan saran, serta mampu menggugah semangat bersama untuk meraih visi bersama. Saat di tengah-tengah pemimpin harus bisa membuat atmosfer organisasi menjadi positif, sehingga akan muncul semangat bersama untuk saling memotivasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

c. Tut Wuri Handayani

   Berarti dari belakang memberikan dorongan. Seorang pemimpin juga harus bisa menempatkan diri di belakang untuk mendorong

individu-individu dalam organisasi yang dipimpinnya berada di depan untuk memperoleh kemajuan dan prestasi. Pemimpin diharapkan mampu untuk mendidik dan mengembangkan yang dipimpinnya agar terbentuk pula pemimpin-pemimpin baru sehingga tercipta proses regenerasi. Sesuai dengan kata pepatah yang menyebutkan Pemimpin yang baik adalah ia yang mampu menyiapkan pemimpin selanjutnya yang lebih baik dari dirinya. sumber : (http://yogautama23.blogspot.co.id di akses tanggal 18 januari jam 20.00)

Herman dalam Muluk (2010:65) mengatakan terdapat enam aspek dari karakter pemimpin politik yang relevan untuk menentukan kepemimpinan politik seorang pemimpin politik, Yaitu :

a. Keyakinan atau paham-paham politik mendasar dari seorang pemimpin.
b. Gaya politik.
c. Motif politik pemimpin dalam mencapai posisi politik.
d. Pola reaksi pemimpin dalam menghadapi situasi stress terutama dalam tekanan politik
e. Bagaimana kondisi psikologi waktu pertama kali pemimpin memasuki dunia politik.
f. Pengalaman dan kemampuan politik sebelumnya.
g. Iklim politik ketika pemimpin memasuki dunia politik.

Terdapat beberapa sifat yang dipandang sebaiknya dimiliki oleh seorang pemimpin yang secara umum telah dikenal, antara lain sebagai berikut :

a. Toleransi (tolerance), yakni seorang pemimpin seharusnya terbuka bagi segala pandangan, gagasan atau ide berasal dari pihak-pihak lain yang konsrtuktif.
b. Kestabilan, yakni pemimpin yang memilki kestabilan emosi ditandai dengan keuletan, mempunyai kepercayaan diri dan selalu ingin mengetahui terhadap banyak hal yang berhubungan dengan pelaksaan tugasnya.
c. Teguh pendirian, seorang pemimpin yang berhasil menunjukan kemahiran dalam menilai situasi dan kondisi secara keseluruhan, tajam dalam mebedakan fakta dan cermat dan realistic dalam pengambilan keputusan dan tidak mudah berubah dalam pendirian.
d. Kesungguhan, yakni pemimpin yang berpegang pada tugas, belajar menarik pengalaman dengan sebaik-baiknya terhadap kondisi saat ini untuk memperbaikinya dimasa depan.
e. Ketenangan, seorang pemimpin yang tenang dalam menghadapi segala permasalahan, aktif dan tanggap terhadap segala sesutau yang bersifat tidak tertip.
f. Keyakinan, seorang pemimpin akan berhasil memimpin jika dipercaya/ legitimasi dan diterima oleh orang yang dipimpinya.
g. Kemampuan menganalisa, seorang pemimpin yang mampu menganalisa dalam keadaan yang komplek sekalipun, mampu

menguasai dengan baik permasalahan serta mampu membuat keputusan yang cermat dan tepat.

h. Inisiatif dan dorongan, seorang pemimpin mempunyai daya untuk membuat yang baru atau ide baru untuk menyelesaikan pekerjaan serta kemampuan mendorong bawahannya.

i. Terarah, seorang pemimpin cakap dalam memberikan pengarahan, dalam arti mampu memberikan pengarahan secara gamblang mengenai tugas yang harus dikerjakan.

j. Tanggap dan terampil, seorang pemimpin cepat memahami persoalan, situasi dan kondisi lingkungan dan cermat serta cepat dalam mengambil keputusan.

k. Cakap dan luwes, seorang pemimpin memiliki pengetahuan, wawasan, pengalaman yang dibutuhkan dan kemampuan untuk menyelesaikan tugasnya.

l. Melayani masyarakat, seorang pemimpin selalu menyediakan waktunya untuk melayani dan mengabdikan untuk kepentingan anggota organisasi dan msayarakat untuk keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi yang dipimpinya. Dalam buku orientasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kementrian dalam Negeri (2014:11).

4. Fungsi Pemimpin

Hersey dan Blanchard, dalam Rivai dan Mulyadi (2010:74), kepemimpinan yang efektif hanya akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi-fungsi kepemimpinan tersebut adalah:

a. Fungsi Instruksi

Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa,bagaimana, bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dilaksanakan secara efektif. Fungsi instruksi adalah kemampuan pimpinan menggerakkan orang lain agar melaksanakan perintah, yang bersumber dari keputusan yang ditetapkan.

b. Fungsi Konsultasi

Fungsi ini berlangsung dan bersifat kominukasi dua arah, meskipun pelaksanaannya sangat bergantung pada pihak pemimpin dengan menjalankan fungsi konsultasi, dapat diharapkan keputusan dari pemimpin akan mendapat dukungan dan akan lebih mudah menginstruksikannya, sehingga kepemimpinan berjalan efektif.

c. Fungsi Partisipasi

Fungsi ini berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif, antara pemimpin dengan yang dipimpin. Pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam pelaksanaannya

d. Fungsi Pengendalian

Fungsi ini cenderung bersifat komunikasi satu arah. Pengendalian yang dimaksud adalah kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggota bawahannya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal.

e. Fungsi Delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Pemimpin harus bersedia dan dapat mempercayai orang lain, sesuai dengan posisi atau jabatannya apabila diberi pelimpahan wewenang. Kepercayaan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

B. Gaya Kepemimpinan

1. Definisi Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan, mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Menurut Hasibuan (2016:162), gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan merupakan salah satu posisi kunci dimana

seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi, mengarahkan, dan menunjukan kemampuannya agar semua tujuan perusahaan bisa tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memahami situasi sehingga dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang ada. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat mempengaruhi keberhasilannya dalam memimpin kelompoknya, karena dengan cara tersebut Ia akan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Dalam kepemimpinan, dikenal beberapa gaya kepemimpinan. Efektif atau tidaknya suatu gaya kepemimpinan berdasarkan dua hal yang mendasar, yaitu hubungan pemimpin dengan tugasnya dan hubungan pemimpin dengan bawahannya.

2. Macam-macam Gaya Kepemimpinan

Menurut Handoko (2005:54) ada tiga macam gaya kepemimpinan yang mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai, yaitu :

a. Gaya Kepemimpinan Demokratis

Kepemimpinan demokratis ditandai dengan adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Dibawah kepemimpinan demokratis bawahan cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri gaya

Handoko (2005:54). Rivai (2004:122) mengatakan gaya kepemimpinan ini ditandai oleh adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Dalam gaya kepemimpinan ini, ada kerjasama antara atasan dengan bawahan. Dibawah kepemimpinan demokratis bawahan cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri.

Pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan bahwa tipe pemimpin yang demokratislah yang paling tepat untuk organisasi modern. Gaya kepemimpinan ini mendeskripsikan pemimpin yang cenderung mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan, mendelegasikan kekuasaan, mendorong partisipasi bawahan dalam menentukan bagaimana metode kerja dan tujuan yang ingin dicapai, dan memandang umpan balik sebagai suatu kesempatan untuk melatih bawahan. Gaya demokratis mampuan mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan.

Pemimpin yang demokratik biasanya memandang peranannya selaku koordinator dan integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi. Pemimpin menempatkan dirinya sebagai pengontrol, pengatur dan pengawas dari organisasi tersebut dengan tidak menghalangi hak-hak bawahannya untuk berpendapat. Dia juga

berfungsi sebagai penghubung antar departemen dalam suatu organisasi. Organisasi yang dibuat dengan teori demokratis ini pun memiliki suatu kelebihan, dimana setiap tugas dan wewenang dari pengurus organisasi tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga jelas bagian-bagian tugas dari masing-masing pengurus, yang mana nantinya tidak akan terjadi campur tangan antar bagian dalam organisasi tersebut. Pembagian tugas ini juga sangat efisien dan efektif bila diterapkan dalam suatu organisasi dimana tujuan utama dari organisasi adalah tercapainya tujuan dan kepentingan bersama.

Sutarto (2006: 75-76) menyatakan ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis adalah sebagai berikut:

1. Wewenang pemimpin tidak mutlak yaitu keputusan pimpinan bisa dipengaruhi oleh masukan dari bawahan,bukan sebagai bentuk interferensi, dalam hal ini lebih ditekankan dari asas musyawarah
2. Keputusan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan yaitu Setiap keputusan yang diambil tidak hanya berasal dari pimpinan mutlak, namun telah dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama bawahannya.
3. Kebijaksanaan dibuat bersama pimpinan dan bawahan yaitu Setiap Kebijakan yang dibuat tidak hanya berasal dari pimpinan mutlak, namun telah dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama bawahannya.

4. Komunikasi berlangsung timbal balik, baik yang terjadi antara pimpinan dan bawahan maupun antara sesama bawahan yaitu Komunikasi antara pimpinan dan bawahan berlangsung dengan baik, tanpa adanya rasa takut atau canggung karena jabatan
5. Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan atau kegiatan para bawahan dilakukan secara wajar yaitu Pemimpin tidak melakukan pengawasan kegiatan secara over atau over protective, sehingga tidak ada tekanan pada bawahan saat melakukan kegiatannya, bawahan pun menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan atasannya
6. Banyak kesempatan bagi bawahan untuk menyampaikan saran, pertimbangan, atau pendapat yaitu Bawahan bebas untuk berpendapat sesuai dengan asas demokrasi
7. Tugas-tugas kepada bawahan diberikan dengan lebih bersifat permintaan dan pada instruksi yaitu Tugas yang diberikan pimpinan bisa berasal dari permintaan bawahan yang tentunya berdampak positif bagi organisasi tersebut
8. Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul bersama pimpinan dan bawahan yaitu pemimpin dan karyawan tidak mengambil tanggung jawab masing-masing namun bersama-sama mengemban tanggug jawab.

Kepemimipinan demokratis ini sangat cocok diterapkan pada anggota yang mempunyai inisiatif atau kreatifitas yang tinggi sehingga tanpa komando dari pimpinan akan selalu muncul ide-ide yang brilian dari

karyawan guna pengembangan lembaga tersebut. Selain itu juga cocok diterapkan pada anggota yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi, anggota yang patuh pada aturan, tidak suka berbuat onar, mempunyai rasa toleransi yang tinggi, dan yang paling penting mampu bekerja sama dalam satu tim.

b. Gaya Kepemimpinan Otoriter

Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi Handoko (2005:54). Rivai (2004:122) mengatakan bahwa kepemimpinan otoriter disebut juga kepemimpinan direktif atau diktator. Pemimpin memberikan instruksi kepada bawahan, menjelaskan apa yang harus dikerjakan, selanjutnya karyawan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh atasan. Gaya kepemimpinan ini menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi.

Gaya kepemimpinan ini menghimpun sejumlah perilaku atau gaya kepemimpinan yang bersifat terpusat pada pemimpin sebagai satu-satunya penentu, penguasa dan pengendali anggota. Dengan kata lain gaya kepemimpinan otoriter ini menghimpun sejumlah perilaku atau

gaya kepemimpinan yang bersifat terpusat pada pemimpin (sentralistik) sebagai satu-satunya penentu, penguasa, dan pengendali anggota organisasi dan kegiatannya dalam usaha mencapai tujuan.

Sutarto (2006: 75-76) menyatakan ciri-ciri gaya kepemimpinan otoriter adalah sebagai berikut:

1. Wewenang mutlak terpusat pada pimpinan yaitu keputusan pimpinan tidak dipengaruhi oleh masukan dari bawahan, dan bawahan harus mengikuti wewenang yang diberikan seorang pemimpin.
2. Keputusan dibuat oleh pimpinan yaitu Setiap keputusan yang diambil hanya berasal dari pimpinan mutlak, tidak ada dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama bawahannya.
3. Kebijaksanaan selalu dibuat oleh pimpinan yaitu Setiap Kebijakan yang dibuat mutlak berasal dari pimpinan, tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama bawahannya.
4. Komunikasi berlangsung satu arah dari pimpinan ke bawahan yaitu Komunikasi antara pimpinan dan bawahan berlangsung dengan tidak baik, anngota merasakan rasa takut atau canggung karena jabatan
5. Para bawahannya dilakukan secara ketat yaitu Pemimpin melakukan pengawasan kegiatan secara over atau over protective, sehingga ada tekanan pada bawahan saat melakukan kegiatannya.
6. Tiada kesempatan bagi bawahan untuk memberikan saran, pertimbangan, atau pendapat yaitu bawahab tidak berhak

menyampaikan aspirasi nya untuk memberikan masukan kepada atasan.

7. Tugas-tugas dari bawahan diberikan secara instruktif yaitu atasan memberikan instruktif langusung pada bawahan dan bawahan harus melakukannya walaupun tidak suka.
8. Tanggung jawab keberhasilan organisasi hanya dipikul oleh pimpinan yaitu keberhasilan dan kegagalan seuatau lembaga hanya di tanggung oleh pemimpin lembaga tersebut.

c. Gaya Kepemimpinan *Laissez-faire* (kendali bebas)

Gaya kepemimpinan kendali bebas mendeskripsikan pemimpin yang secara keseluruhan memberikan bawahannya atau kelompok kebebasan dalam pembuatan keputusan dan menyelesaikan pekerjaan menurut cara yang menurut bawahannya paling sesuai Handoko (2005: 54). Rivai (2004:122) mengatakan Gaya kepemimpinan ini memberikan kekuasaan penuh pada bawahan, struktur organisasi bersifat longgar, pemimpin bersifat pasif. Peran utama pimpinan adalah menyediakan materi pendukung dan berpartisipasi jika diminta bawahan. Gaya kepemimpinan ini pada dasarnya berpandangan bahwa anggota organisasi mampu mandiri dalam membuat keputusan atau mampu mengurus dirinya masing-masing, dengan sedikit mungkin pengarahan atau pemberian petunjuk dalam merealisasikan tugas pokok masing-masing sebagai bagian dari tugas pokok organisasi.

gaya kepemimpinan *laissez faire* ini pemimpin praktis tidak memimpin, dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semau sendiri. Kepemimpinannya dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing baik secara perseorangan maupun beruba kelompok-kelompok kecil. Pemimpin hanya memfungsikan dirinya sebagai penasehat, yang dilakukan dengan memberi kesempatan untuk berkompromi atau bertanya bagi anggota kelompok yang memerlukannya.

Sutarto (2006: 75-76) menyatakan ciri-ciri gaya kepemimpinan *Laissez-faire* adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan yaitu bawahan mengambil ali semua wewenang yang harus diambil dan pemimpin tidak berperan dalam pengambilan keputusan.
2. Keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan yaitu keputusan yang dalam lembaga diambil oleh anggota tidak menggunakan persetujuan dan kewenangan seorang pemimpin.
3. Kebijaksanaan lebih banyak dibuat oleh para bawahan yaitu semua kebijakan diambil oleh bawahan dan pemimpin tidak ikut merumusakan atau membuat kebijkan tersebut.

4. Pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahan yaitu komunikasi berjalan satu arah komunikasi dilakukan jika bawahan melakukan komunikasi terlebih dahulu.
5. Hampir tiada pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, atau kegiatan yang dilakukan para bawahan yaitu pemimpin tidak ikut dalam mengawasi semua sikap, tingkah laku, perbuatan, tau kegiatan karena bawahan memegang kendali penuh terhadap kembaga tersebut.
6. Peranan pimpinan sangat sedikit dalam kegiatan kelompok yaitu pemimpin tidak berperan dalam pengambilan keputusan yang dialakukan dalam memutuskan kebijakan lembaga tersebut.
7. Kepentingan pribadi lebih utama dari kepentingan kelompok yaitu individualistis anggota dan pemimpin sangat terasa dan tidak adanya kerjasama dalam lembaga.
8. Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul orang perorangan yaitu tanggung jawab dalam lembaga dan keberhasilan dalam lembaga di terima oleh semua anggota.

Pendapat lain dikemukakan James Mc. Gregor, seperti yang dikutip oleh Sedarmayanti (2009:184-185) menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) gaya kepemimpinan, yaitu:

a. Kepemimpinan Transaksional

   Gaya kepemimpinan transaksional menupakan gaya dimana seseorang memimpin cenderung memberikan arahan kepada bawahan, serta memberikan imbalan dan hukuman kepada bawahan. Kepemimpinan

transaksional lebih menekankan kepada transaksi antara pemimpin dan bawahan. Pada kepemimpinan transaksional memungkinkan pemimpin memotivasi dan mempengaruhi bawahan dengan cara *reward* dengan kinerja tertentu, dengan kata lain sebuah transaksi bawahan dijanjikan mendapatkan *reward* atau penghargaan bila bawahan mampu menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama.

b. Kepemimpinan Transformasional

Gaya kepemimpinan transformasional adalah gaya bagi seorang pemimpin yang cenderung memberi motivasi kepada bawahan untuk melakukan tindakan yang lebih baik dan menitik beratkan pada perilaku membantu/transformasi antar individu dengan organisasi. Kepemimpinan transformasional pada hakikatnya menekankan bahwa seorang pemimpin perlu memotivasi bawahannya untuk melakukan tanggung jawab lebih dari apa yang diharapkan.

C. DPRD dan Fraksi DPRD

1. Definisi Lembaga DPRD

Lembaga legislatif di Indonesia lebih dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), badan legislatife di Negara-negara demokrasi disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayotitas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya. Menurut Strong dalam Budihardjo (2008:316) Demokrasi adalah suatu system pemerintahan yang

mayoritas anggota dewasa dari suatu komunitas politik berpartisipasi atas dasar system perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakannya kepada *mayoritas* itu. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu.

DPR berkedudukan ditingkat pusat sedangkan yang berada di tingkat provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Badan legislatif di Indonesia adalah struktur politik yang mewakili rakyat Indonesia dalam menyusun undang-undang serta melakukan pengawasan atas simplementasi undang-undang oleh badan eksekutif dimana para anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Struktur-struktur politik yang masuk kategori ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tingkat I dan Tingkat II, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota. Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD karena dipilih langsung oleh rakyat melalui

pemilihan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum ditetapkan sebagai berikut:

a. Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang.
b. Jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang.
c. Jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.

2. Definisi Frakasi DPRD dan fungsinya

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik. Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi.

Fraksi yang merupakan pengkrucutan dari masing-masing anggota legislatif yang memiliki latar belakang partai yang sama (terkecuali fraksi gabungan). Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPRD. Fraksi mempunyai sekretariat. Sekretariat Jenderal DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi. Setiap anggota DPRD menjadi anggota salah satu fraksi. Setiap

fraksi di DPRD adapun jumlah fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD. Pimpinan Fraksi terdiri atas dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, dan fraksi mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota masing-masing fraksinya.
b. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi.
c. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para Anggota.
d. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu. Sumber: (http://dprd.jatimprov.go.id/fraksi di akses tanggal 6 jam 10.30)

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran yang akan melandasi penelitian ini. Pada dasarnya seorang pemimpin mempunyai gaya atau style dalam memimpin, hal ini akan banyak perbengaruh terhadap keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku pengikut-pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan cara atau norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain yang diamati. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada tiga gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Handoko yaitu gaya kepemimpinan demokrasi, gaya kepemimpinan otoriter, dan gaya kepemimpinan *lazzies faire*

Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, orientasi, tindakan dan lainnya, secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Devis dalam Sarwono (2006:15) meberikan karateristik sebagai berikut :

1. Metode bersifat kritis dan analisi.
2. metode harus bersifat logis
3. metode harus bersifat obyektif
4. metode harus bersifat konseptual dan teoritis

Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dikarenakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang yang perilakunya yang dapat diamati. Berkaitan dengan penelitian dilakukan peneliti mencoba untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian diperlukan dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif, Fokus analisis penelitian adalah membahas berbagai data yang telah terkumpul dalam kode-kode, ataupun tanda-tanda Santana (2007:46).karena fokus penelitian ini memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dalam pengumpulan data yang diambil dari lapangan akan lebih spesifik dan tidak terlalu melebar ke permasalahan-permasalahan yang tidak berkaitan dengan penelitian. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepemimpinan demokratis :
   a. Keputusan dan kebijakan diambil bersama antara pimpinan dan bawahan.
   b. Komunikasi berlangsung timbal balik.
   c. Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan atau kegiatan para bawahan dilakukan secara wajar.
   d. Banyak kesempatan bagi bawahan untuk menyampaikan saran, pertimbangan, atau pendapat.

2. Kepemimpinan otoriter :
   a. Keputusan dan kebijakan diambil oleh pimpinan.
   b. Komunikasi berlangsung satu arah.
   c. Para bawahannya diperlakukan secara ketat.

d. Tiada kesempatan bagi bawahan untuk memberikan saran, pertimbangan, atau pendapat.

3. Kepemimpinan *laissez-faire* :

a. Keputusan dan kebijakan lebih banyak diambil oleh para bawahan.

b. Pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahan.

c. Hampir tiada pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, atau kegiatan yang dilakukan para bawahan.

d. Peranan pimpinan sangat sedikit dalam kegiatan kelompok.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*). Penelitian ini dilakukan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Alasan memilih lokasi penenlitian ini adalah karna lembaga DPRD ini merupakan lembaga tinggi di Provinsi Lampung yang merupakan pemimpin dan wakil rakyat di Provinsi Lampung.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Morse dalam Flick (2014:166) sumber data dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder :

1. Data Primer

   Data Primer, merupakan suatu objek atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang bisa disebut *frist-hand information.* Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Menurut Silalahi (2012:289). Data-data primer ini merupakan unit analisis utama yang digunakan dalam kegiatan analisis data. Secara aplikatif data primer ini diperoleh penulis selama proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi. Data primer dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Data Primer

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Tulus Puronomo Wibowo	Ketua Fraksi
2	Toto Sumirat. S, SH	Anggota Fraksi
3	Edi Rusdianto, SH, MM	Serkertatis fraksi
4	M Habib Purnomo S.Ag	Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan
5	Dahlan Sulaiman S. Sos	Kepala Sekertariat dan Tenaga ahli Fraksi
6	Sudarmono	Tokoh masyarakat Kecamatan Jati Agung
7	Muhammad Nurkolis	Masyarakat desa simbaringin

Sumber: diolah peneliti

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Menurut Silalahi (2012:291) merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakuka data sekunder dapat diperoleh peneliti dari catatan-catatan, arsip, dan dokumen-dokumen, perundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan kepemimpinan ketua fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Lampung. Adapaun data skunder dari penelitian ini adalah perda Nomor 8 tahun 2016 dan notulensi rapat ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan ketiga teknik tersebut, akan tetapi analisis juga sangat di butuhkan dalam mengumpulkan data. Analisis memungkinkan kita untuk meningkatkan pemahaman, memperluas teori, dan memajukan pengetahuan Neuman (2014:477) yang lebih utama adalah teknik wawancara mendalam karena teknik ini dapat mengungkapkan makna yang tersembunyi dibalik suatu fenomena yang nampak. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan observasi dan dokumentasi digunakan untuk membantu, memperkaya, dan melengkapi data penelitian.

1. Observasi

   Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis pada obyek penelitian. Pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. Nasution dalam Sugiyono (2012:226) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan.

   Menurut Shapiro (2014:25-26) Pengamatan atau observasi adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematif dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi Widi, (2010:237).

2. Wawancara

   Wawancara menurut Sugiyono (2014:231) yaitu, pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peran pewawancara dengan informan haruslah pewawancara yang lebih aktif, sehingga kita

dapat mendapatkan esensi serta hasil tujuan wawancara Halperin dan Heath (2012:253-254). Ada dua jenis wawancara dalam penelitian kualitatif, dua jenis wawancara itu adalah wawancara terstruktur dan wawancara semi-terstruktur Bryman (2012:469).Pada proses ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Pertanyaan yang diajukan teresebut diharapkan dapat membantu peneliti menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang mengacu pada fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, dengan wawancara peneliti akan dapat bertukar informasi dan ide terkait dengan gaya kepemimpinan ketua fraksi DPRD Provinsi Lampung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumentasi. Menurut Silaen dan Widiyono (2013:163) Dokumentasi merupakan peninggalan tertulis mengenai data berbagai keguiatan atau kejadian dari suatu organisasi yang dari segi waktu yang relatif belum terlalu lama. Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen.

Dokumen yang digunakan dapat berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan dari ketua fraksi, buku harian, laporan kegiatan, panduan pelaksanaan kegiatan, arsip-arsip, foto-foto, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan

untuk melengkapi data yang tidak didapatkan dari proses wawancara. Agar data yang diperoleh peneliti dapat teruji kebenarannya.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data sebagaimana yang disebutkan Moleong (2006:38) dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif adalah:

1. Editing

   Editing yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu memeriksa ulang data yang telah terkumpul dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Dalam tahap ini, yang dikoreksi adalah meliputi hal-hal sebagai berikut yakni: keterbacaan tulisan atau catatan, kejelasan makna, kesesuaian jawaban satu sama lainnya, relevansi jawaban dan keseragaman data serta melakukan identifikasi data yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Interpretasi

   Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dari lapangan, dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar Neuman (2007:328). Analisis Data Kualitatif Moleong (2006:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Pada penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan tiga komponen analisis, menurut Matew Milles dan Haberman dalam Sugiyono (2014:248) yaitu:

1. Reduksi Data (*Reduction Data*).

   Reduksi data diartikan sebagai peroses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Laporan atau data yang diperoleh dilapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnnya. Pada tahapan ini, peneliti melakukan pemilihan data yang telah didapat di lapangan yang dapat diperlukan berdasarkan fokus penelitian untuk dapat disajikan dalam penyajian data.

2. Penyajian Data (*Data Display*).

   Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakanya suatu kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusoin Drawin*g).

   Penarikan Kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentative.

H. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan salah satu teknik yang penting dalam menentukan validitas dan realibilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi.

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Menurut Moleong (2006:29). Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

IV. GAMBARAN UMUM

Pada bab ini peneliti pertama-tama akan memaparkan tentang gambaran umum Provinsi Lampung dalam kaitannya dengan gaya kepemimpinan ketua fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Selanjutnya peneliti juga akan menjabarkan tentang Provinsi Lampung. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan tentang partai PDI Perjuangan itu sendiri serta fungsi dan tata kerja dari DPRD dan Fraksi yang ada di lembaga DPRD Provinsi Lampung.

A. Provinsi Lampung

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103º40” (BT) Bujur Timur sampai 105º50” (BT) Bujur Timur dan 3º45” (LS) Lintang Selatan sampai 6º45” (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km (Lampung dalam angka, BPS 2012) termasuk 132 pulau di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai kearah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan lebih kurang 24.820 km (atlas sumberdaya pesisir Lampung, 1999). Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk

Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Batas administrasi wilayah Provinsi Lampung adalah :

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
2. Sebelah Selatan dengan selat Sunda
3. Sebelah Timur dengan laut Jawa 30
4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari Kota Kembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relative luas dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta Pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (telukbetung), Tarahan dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung dan laut Jawa terdapat pula Pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Disamping itu Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalah Radin Inten II yaitu nama baru dari Branti 28 Km dari ibukota melalui jalan Negara menuju Kotabumi dan Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra.

Kondisi Topografi Menurut kondisi topografi, Provinsi Lampung dapat dibagi ke dalam 5 (lima) satuan ruang, yaitu: Daerah berbukit sampai bergunung, dengan ciri khas lereng-lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25% dan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan

laut (dpl). Daerah ini meliputi Bukit Barisan, kawasan berbukit di sebelah Timur Bukit Barisan, serta Gunung Rajabasa.

1. Daerah berombak sampai bergelombang, yang dicirikan oleh bukit-bukit sempit, kemiringan antara 8% hingga 15% dan ketinggian antara 300 meter 31 sampai 500 meter (dpl). Kawasan ini meliputi wilayah gedung tataan, kedaton, sukoharjo dan pulau panggung di daerah Kabupaten Lampung Selatan serta adirejo dan bangun rejo di daerah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Dataran alluvial, mencakup kawasan yang sangat luas meliputi Lampung Tengah hingga mendekati pantai sebelah timur. Ketinggian kawasan ini berkisar antara 25 hingga 75 meter (dpl) dengan kemiringan 0% hingga 3%.
3. Rawa pasang surut di sepanjang pantai timur dengan ketinggian 0,5 hingga 1 meter (dpl).
4. Daerah aliran sungai, yaitu Tulang Bawang, Way Seputih, Way Sekampung, Way Semangka, dan Way Jepara**.**

B. Sejarah Singkat PDI Perjuangan

PDI merupakan fusi dari 5 parpol, yakni PNI, Parkindo, Partai katolik, Murba dan IPKI, akibat keinginan rezim Orde Baru untuk melakukan penataan dan penyederhanaan kepartaian dari 10 menjadi 3, yakni Golkar, PDI dan PPP. Dua partai terakhir merupakan hasil fusi yang dipaksakan setelah melalui proses selama kurang lebih 3 tahun, baik di balik layar maupun di parlemen.

PDI berfusi pada 10 Januari 1973 sementara PPP pada 5 Januari 1973 setelah adanya “ancaman pembubaran” oleh Soeharto sebelum 11 Maret 1973. Fusi lima parpol berlangsung pada 10 Januari 1973 tersebutlah yang kini dirayakan sebagai hari ultah PDI Perjuangan. Kelima partai tersebut memiliki latar belakang, basis sosial, ideologi dan sejarah perkembangan yang sangat berbeda.

Pasca kelahiran PDI, dalam perjalanannya partai ini banyak mengalami konflik politik diinternal DPP yang berakhir dengan krisis kepemimpinan melanda PDI. Watak kader PDI sebagai “pemberontak” terhadap rejim tak bisa dibunuh hanya dengan menguburkan tokoh-tokoh senior. Generasi baru ini ternyata juga memendam mimpi untuk dapat independen dan sekaligus tumbuh menjadi partai besar. Dan ini dilihat sebagai ancaman bagi kelangsungan kekuasaan dan dominasi Golkar dan militer. Munculnya figur baru pada KLB Suarabaya, yaitu Megawati yang menurut penguasa lebih mengancam maka dengan segala kemungkinan cara akhirnya ditempuh penguasa untuk menghalangi kemunculan figur ini. Tetapi tekad arus bawah, dukungan publik dan media, serta konsistensi sikap membawa kemenangan de facto bagi penguasa. Kekuatan-kekuatan rejim yang berada dalam parpol terus dimobilisasi untuk menggagalkan hal ini. Tapi hasilnya sangat mengcewakan rejim. Akhirnya, lewat proses Munas di Jakarta penguasa dengan terpaksa harus mengakui legalitas formal Mega sebagai pimpinan baru.

Tapi ini tidak membuat penguasa berputus asa. Segala jalan tetap ditempuh untuk menyudahi perannya, apalagi tanda-tanda bahwa PDI akan menjadi kekuatan sangat berpengaruh mulai jelas tampak di bawah kepemimpinan Megawati. Mencari figur untuk “mengimbangi” Mega dalam pengaruh di arus bawah bukan pekerjaan mudah. Sejumlah tokoh senior partai seperti Budi Hardjono sudah coba diplot. Tapi hasilnya tetap mengecewakan. Dalam kepanikan inilah figur Soerjadi kembali dilirik. Dalam konteks inilah, sebuah persekongkolan dibangun. Muncul tuntutan dari daerah-daerah untuk menyelenggarakan KLB untuk mengakhiri kepemimpinan Mega, hasil akhirnya adalah DPP kembar.

Di tingkat Jakarta dan daerah-daerah, perlawanan kolektif yang melibatkan elemen lebih luas, termasuk LSM, terhadap hasil KLB muncul secara konsisten. Di tengah-tengah keputusasaan ini, cara kekerasan dijadikan pilihan oleh penguasa. Hasilnya adalah Peristiwa 27 Juli 1996 yang memakan korban jiwa dan harta benda yang besar. Peristiwa ini melahirkan kehebohan politik maha besar, bahkan hingga ke dunia internasional. Mega dan PDI dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Godaan untuk melakukan perlawanan masif terbuka, apalagi dukungan rakyat demikian kongkrit. Tetapi akhirnya Mega memutuskan untuk menggunakan instrumen legal untuk menyudahi kasus ini. Munculah TPDI yang secara konsisten menguasai dan sekaligus mendikte opini publik.

Di luar perhitungan penguasa, peristiwa kelabu 27 Juli justru berbalik menjadi titik awal kebangkitan perlawanan masif terhadap Orba. Dan ini dibuktikan dengan jelas dari meluasnya aksi perlawanan terhadap Orba dan hilang totalnya suara PDI Soerjadi dalam Pemilu 1997. Kebangkrutan total dalam Pemilu dan turunnya Soeharto tidak secara otomatis membawa perubahan sikap penguasa Habibbie atas status legal PDI. Kehendak untuk tetap memastikan PDI tidak muncul sebagai partai besar dan kehendak untuk mengeliminasi Megawati tetap menjadi obsesi. Karenanya, Kongres PDI di Palu tetap mendapatkan dukungan penuh penguasa. Tetapi rakyat punya cara sendiri untuk mengadili kubu Soerjadi dan sekaligus memberikan dukungan bagi Megawati. Pada gilirannya, Pemilu 1999 menjadi arena pembuktian. PDI Soerjadi bangkrut total, sementara PDI Perjuangan mendapatkan dukungan luar biasa: hampir 35% di tingkat nasional. Untuk mensiasati posisi politik rejim yang belum juga berubah, akhirnya dalam KLB di Bali diputuskan perubahan nama ke PDI Perjuangan. Hal ini semata-mata guna dapat memenuhi syarat legal untuk dapat menjadi peserta pemilu

C. Profil DPRD Provinsi Lampung

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah di tingkat provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah, yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu). DPRD Provinsi merupakan mitra kerja gubernur

(eksekutif). DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. DPRD Provinsi Lampung memiliki fungsi :

1. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah.
2. Anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah(APBD).
3. Pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Tabel 4. Daftar Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014

NO	PARTAI	NAMA	JABATAN
1	PDIP	Drs. Hi. Tulus Purnomo Wibowo	Ketua
2		I Komang Koheri, SE	Wakil ketua
3		Danang Sumpena, S.Sos, MM	Wakil ketua
4		Edi Rusdianto, SH, MM	Sekretaris
5		Yanuar Irawan, SE	Wakil Sekrestaris
6		Hj. Syafariah Widianti, SH, MH	Bendahara
7		Hj. Eva Dwiana, SE, M.Si	Wakil Bendahara
8		Mingrum Gumay, SH, MH	Anggota
9		Hi. Watoni Noerdin, SH, MH	Anggota
10		Aprilliati, SH, MH	Anggota
11		Hi. Dedi Afrizal, S.kep	Anggota
12		Bambang Suryadi, SH	Anggota
13		Drs. Yose Rizal	Anggota
14		Hi. M. Rizal, SE	Anggota
15		Toto Sumirat. S, SH	Anggota
16		Ketut Erawan, SH	Anggota
17		Ir. Kadek Suwartika	Anggota
1	DEMOKRAT	Hi. Imer Darius, SE	Ketua
2		Ir. Nerozely Agung Putra	Wakil ketua
3		Muhammad Junaidi, SH	Sekretaris
4		Ir. Hi. Yandri Nazir, MM	Anggota
5		Hi. Toto Herwantoko, MM	Anggota
6		Hertanto Lojaya	Anggota
7		Amaluddin, SH	Anggota
8		Drs. Mozes Herman	Anggota
9		Agus Revolusi. S.sos	Anggota
10		Ir. Raden Muhammad Ismail	Anggota
11		Sugiarto AW	Anggota

1	GERINDRA	Elly Wahyuni, SE, MM	Ketua
2		Edi Hamim, SE, MBA	Sekertaris
3		Hi. Pattimura, SE	Anggota
4		Drs. Hi. Mikdar Ilyas, MM	Anggota
5		Harry Ananda	Anggota
6		Ikwan Fadil Ibrahim, SH	Anggota
7		Hi. Andika Wibawa, SR	Anggota
8		Hi. Putra Jaya Umar	Anggota
9		I Made Suarjaya, SH	Anggota
10		Azwar Safaruddin	Anggota
1	PAN	M. Hazizi, SE	Ketua
2		Hi. Abdullah Fadri Auli, SH	Wakil ketua
3		Hi. Suprapto, S.Psi, MH	Sekretaris
4		Hamidi, SE	Wakil Sekrestaris
5		Joko Santoso, SP	Bendahara
6		Hj. Asmara Dewi	Anggota
7		Abdullah Surajaya	Anggota
8		Hi. Muswir, A,Md	Anggota
1	PKS	Hi. Ade Utama Ibnu, SE	Ketua
2		Hi. Ahmad Mufti Salim, Lc, MA	Wakil ketua
3		Ir. Hi. Akhmadi Sumaryanto	Sekretaris
4		Hi. Antoni Iman, SE	Anggota
5		Ir. Hi. Johan Sulaiman, MM	Anggota
6		Ir. Hi. HAntoni Hasan, M.Si	Anggota
7		Hi. Mardani Umar, SH, MH	Anggota
8		Ir. Hi. Murdiansyah Mulkan	Anggota
1	GOLKAR	Ismet Roni, SH	Ketua
2		Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos	Wakil ketua
3		Hi. M. Thaib Husin	Sekretaris
4		Drs. Hi. Azwar Yacub	Anggota
5		Hi. Miswan Rody, S.IP	Anggota
6		Drs. I Nyoman Suryana	Anggota
7		Drs, FX. Siman	Anggota
8		Drs. Tony Eka Chandra	Anggota
1	NASDEM	Hi. A. Zamzani Yasin	Ketua
2		Fauzan Sibron, SE, Akt	Wakil ketua
3		Hi. Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom	Sekretaris
4		Dr. Hj. Asih Fatwanita	Anggota
5		Budi Yuhanda, SH, M.Kn	Anggota
6		Hj. Sahyana, SE	Anggota

7		Amrullah Ahmad El Hakim	Anggota
8		Hj. Sahanah	Anggota
1	PKB	Hidir Ibrahim, M.Si	Ketua
2		Khaidir Bujung, S.Ag	Wakil ketua
3		Drs. M. Effendi	Sekretaris
4		Drs. Lazuardi Alwi	Anggota
5		Hi. Noverisman Subing, Sh, MM	Anggota
6		Karlina, SE	Anggota
7		Ir. Hi. Midi Iswanto, MH	Anggota
1	PERSATUAN RAKYAT	Hi. M.C. Iman Santoso, SH	Ketua
2		Hi. Hali Fahmi Almarosyi, SE, Akt	Wakil ketua
3		Hi. Yozi Rizal, SH	Sekretaris
4		Hj. Zeldayantie	Anggota
5		Drs. Hi. Abdul Haris	Anggota
6		Angga Jevi Surya	Anggota

Sumber : Diolah Peneliti

D. Definisi Lembaga DPRD

Lembaga legislatif di Indonesia lebih dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), badan legislatife di Negara-negara demokrasi disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayotitas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya. Menurut Strong dalam Budihardjo (2008:316) Demokrasi adalah suatu system pemerintahan yang mayoritas anggota dewasa dari suatu komunitas politik berpartisipasi atas dasar system perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakannya kepada *mayoritas* itu. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu.

DPR berkedudukan ditingkat pusat sedangkan yang berada di tingkat provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Badan legislatif di Indonesia adalah struktur politik yang mewakili rakyat Indonesia dalam menyusun undang-undang serta melakukan pengawasan atas simplementasi undang-undang oleh badan eksekutif dimana para anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Struktur-struktur politik yang masuk kategori ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tingkat I dan Tingkat II, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota. Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

E. Definisi Frakasi DPRD dan fungsinya

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, fraksi

melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik. Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi.

Fraksi yang merupakan pengkrucutan dari masing-masing anggota legislatif yang memiliki latar belakang partai yang sama (terkecuali fraksi gabungan). Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPRD. Fraksi mempunyai sekretariat. Sekretariat Jenderal DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi. Setiap anggota DPRD menjadi anggota salah satu fraksi. Setiap fraksi di DPRD adapun jumlah fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD. Pimpinan Fraksi terdiri atas dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, dan fraksi mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota masing-masing fraksinya.
b. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi.
c. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para Anggota.
d. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang rumusan masalah dan fokus penelitian dan hasil pembahasan yang ditujukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Ketua fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggunakan gaya kepemimpinan Demokrasi dapat dilihat dari indikator-indikator yang dipakai dalam menentukan gaya kepemimpinan tersebut yaitu :

1. Keputusan dan Kebijakan

   Ketua fraksi selalu mengambil keputusan bersama-sama dengan *stakeholder* yang ada melalui rapat-rapat rutin yang dilakukan oleh semua anggota fraksi dan pimpinan DPD. Ada 14 perda yang sudah disahkan pada tahun 2016 dan 4 perda yang dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat yang ada didaerah. Namun dominasi partai terhadap pembuatan peraturan difraksi serta kurang nya sosialisai yang menyebabkan kontituen kurang merasa puas terhadap kinerja fraksi.

2. Komunikasi

   Ketua fraksi selalu melakukan komunikasi yang baik dengan semua *stakeholder* yang ada. Berkomunikasi dua arah dengan semua *stakeholder*

komunikasi yang dilakukan banyak membahas tentang isu-isu yang ada didaerah yang sudah menghasilkan perda No 1 tahun 2016 tentang, serta dengan anggota fraksi yang lain membahas tentang pergantian ketua umum DPD Partai.

3. Pengawasan

   Ketua fraksi melakukan pengawasan dengan sewajarnya tidak berlebihan dilihat dari respon dari semua s*takeholders* yang ada. Semua *stakeholder* yang ada saling mengawasi dalam menjalankan fungsinya masing-masing agar dapat tercapai setiap tujuan yang dinginkan.

4. Kesempatan Menyampaikan Saran, Pertimbangan dan Pendapat

   Ketua fraksi selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap *stakeholder* yang ada. Ketua fraksi selalu memberikan kesempatan kepada anggota fraksi dan pimpinan DPD Partai untuk menyampaikan saran, pertimbangan dan pendapat melalui rapat-rapat yang dilakukan, serta melalui reses yang bagi konstituen untuk menyampaikan saran, pertimbangan dan pendapat.

Hal baru yang muncul dalam penelitian ini yaitu pendapat dari konstituen dari ketua fraksi terkait dengan gaya kepemimpinan yang dipakai oleh ketua fraksi, Konstituen sebenarnya sudah puas dengan gaya kepemimpinan dari ketua fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. Namun konstituen dari ketua fraksi merasa keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh ketua fraksi tidak dirasakan langsung oleh

konstituen dan merasa bahwa kebanyakan keputusan dan kebijakan tersebut hanya dibuat atas pertimbangan partai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran dalam penelitian ini adalah:

1. Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh ketua fraksi memang sudah baik namun pengawasan terhadap anggota dan kinerja angota fraksi yang lain harus ditingkatkan agar berjalan lebih baik lagi.
2. Keputusan dan kebijakan yang dibuat harus lebih baik dan lebih mendengarkan pendapat dari masyarakat. Walapun fraksi adalah kepanjang tangan dari partai politik namun setiap anggota fraksi memiliki tanggung jawab untuk membawa aspirasi dari masyarakat yang memilih dalam pemilu yang kemarin.
3. Sosialisasi terhadap peraturan-peraturan terbaru yang dibuat dilembaga legislatif harus lebih ditingkatkan lagi karena kebanyakan masyarakat tidak terlalu mengerti dan tau tentang peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Budiardjo, Miriam. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Bryman, Alan. 2012. *Social Research Methods.* New York: Oxford University Press.

Flick, Uwe dkk. 2014. *A Companion to Qualitative Research.* London: Sage Publications.

Handoko.HT. 2009.*Manajemen*.Yogyakarta: BPFE.

Hasibuan, Malayu S.P. 2016. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara..

Halperin, Sandra & Heath, Oliver. 2012. *Political Research: Methods and Practical Skills.* New York: Oxford University Press.

Kaloh. J. 2003. *Kepala Daerah. Jakarta*: PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Moleong , Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya

Muluk. Hamdi.2010. Mozaik Paikologi Politik Indonesia.PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Neuman, W Laurence. 2007. *Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches.* Boston: Pearson Education Limited

Neuman, W Laurence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches.* Boston: Pearson Education Limited.

Kartono, Kartini. 2008. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Orientasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2014-2019.Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesai.

Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan Dan PerilakuOrganisasi*. Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Rivai dan Mulyadi. 2010. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Ketiga.* Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Sanusi, Achmad. 2009. *Kepemimpinan Sekarang dan Masa Depan*.Prospec.Bandung.

Santana, Septiyawan. 2007. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Silalahi, Ulber. 2012. *MetodePenelitianSosial.*Bandung: PT RefikaAditama

Silaen, Sofardan Widiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial :Untuk Penulisan Skripsidan Tesis.* Jakarta: In Media.

Sutarto. 2006. *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*. Gajah Mada University Press.Yogyakarta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik. Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan*. PT RefikaAditama. Bandung.

Shapiro, Ian. 2014. *Problems and Methods in the Study Politics.* Cambridge:Cambridge University Press.

Thoha, Miftah. 2012. *Kepemimpinan Dalam Manajemen.* Jakarta. PT Raja GrafindoPersada.

Thoha, Miftah. 2010. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya* . Jakarta. PT Raja GrafindoPersada.

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sumber Dokumen :

Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Perda Nomor 8 Tahun 2016 tetang Pembentukan Dan susunan Prangkat Daerah Provinsi lampung

SumberLain:

http://yogautama23.blogspot.co.id/2014/10/filosofi-kepemimpinan-ki-hajar-dewantara.html diakses tanggal 6 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB

http://dprd.jatimprov.go.id/fraksi diakses tanggal 6 Oktober 2016 Pukul 19.03 WIB

http://m.tempo.co/read/news/2013/10/20/078523122/Ini-Hasil-Survei-Nasional-Kinerja-Para-Menteri-SBY diakses tanggal 14 oktober 6.59 WIB